

PENGUATAN POSISI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP TUGAS PENGAWASAN KLAUSULA BAKU

ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan biaya yang lebih murah dari pengadilan sehingga tidak memberatkan konsumen saat mencari keadilan. BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa konsumen namun memiliki tugas lain yaitu melakukan pengawasan perjanjian baku untuk memastikan bahwa klausula baku yang termuat di dalamnya tidak melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengawasan klausula baku yang dilakukan oleh BPSK seharusnya bersifat aktif untuk mencegah adanya pelanggaran dan memastikan pelaku usaha memuat klausula baku yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun dalam praktiknya, pengawasan klausula baku belum dilakukan secara aktif dan masih berupa pasif. Tidak hanya itu, pengedukasian perihal klausula baku pun belum gencar dilakukan sehingga masih adanya pihak konsumen yang tidak mengerti mengenai klausula baku dan haknya.

Pengawasan klausula baku yang dilakukan oleh BPSK belum berjalan secara aktif dikarenakan oleh beberapa hal yang berasal dari dalam dan luar BPSK yang perlu diulas dan diperbaiki untuk membuat kinerja BPSK semakin baik serta menjalankan tugasnya. Permasalahan-permasalahan yang ada ini membuat BPSK sulit untuk menjalankan tugas-tugasnya khususnya pengawasan klausula baku. Tidak terjalankannya pengawasan klausula menyulitkan konsumen karena pelaku usaha dapat dengan bebas memuat klausula baku tanpa adanya pengawasan yang semakin memojokkan posisi konsumen. Maka dari itu diperlukan peninjauan kembali perihal permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BPSK apalagi permasalahan tersebut sudah berlangsung secara lama dan belum menemukan titik terang yang menyelesaikannya secara baik.

KATA KUNCI : BPSK, klausula baku, konsumen.

STRENGTHENING THE POSITION OF THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION BODY ON THE TASK OF MONITORING STANDARD CLAUSES

ABSTRACT

The Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) is a government institution created as an alternative to out-of-court consumer dispute resolution at a lower cost than the court so as not to burden consumers when seeking justice. BPSK as a consumer dispute resolution institution is not only tasked with resolving consumer disputes but has another duty, namely to supervise standard agreements to ensure that the standard clauses contained therein do not violate Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection.

The supervision of standard clauses conducted by BPSK should be active to prevent violations and ensure that business actors contain standard clauses that are in accordance with the Consumer Protection Law. However, in practice, the supervision of standard clauses has not been carried out actively and is still passive. Not only that, the education of standard clause parties has not been intensively carried out so that there are still consumers who do not understand about standard clauses and their rights.

The supervision of standard clauses conducted by BPSK has not been running actively due to several issues originating from inside and outside BPSK that need to be reviewed and improved to make BPSK's performance better and to carry out its duties. These existing problems make it difficult for BPSK to carry out its duties, especially the supervision of standard clauses. The non-implementation of clause supervision makes it difficult for consumers because business actors can freely contain standard clauses without any supervision which further corners the position of consumers. Therefore, it is necessary to review the problems faced by BPSK, especially since these problems have been going on for a long time and have not found a bright spot that resolves them properly.

Key words: *BPSK, standard clauses, consumers.*